



SEJARAH PGRI

A. PGRI Masa Sebelum Kemerdekaan

- Pada zaman Belanda dimulai pada tahun 1912, berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang diketuai oleh Karto Soebroto.
- Anggota: Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Pendidikan mereka juga berbeda-beda; ada yang tamatan KS, NS dan lain-lain.
- PGHB yang berbentuk union itu pecah, bahwa masing-masing anggota berjuang sesuai dengan program kerjanya, terutama dalam memperjuangkan perbaikan gaji.
- Pada tahun 1919, di samping PGHB, terbentuk pula gerakan-gerakan baru di antaranya Persatuan Guru Bantu (PGB), Persatuan Normalschool (PNS), oud Kweekschoolieren Bond (KSB), dan School Opzieners Bond (SOB). Perpecahan ini sangat buruk akibatnya bagi guru, antara lain martabat guru menjadi turun dan mereka tidak kompak lagi dalam memperjuangkan statusnya.

A. PGRI Masa Sebelum Kemerdekaan

- Pada tahun 1932 nama PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Indonesia). Penggantian nama "Hindia Belanda" dengan "Indonesia." Dengan nama organisasi ini mengejutkan Belanda, karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak disenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat nasionalisme. Sebaliknya, bagi para guru dan bangsa Indonesia umumnya, nama itu sangat disukai dan diidam-idamkan. PGI ini terdiri dari berbagai bond yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau yang lainnya, seperti Nederlands Indische Onderwys Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama, Christelijke Onderwijs Vereniging (COV), Katholieke Onderwysbond (KOB), Vereniging Van Mulleerkrachten (VVM), dan lain-lain

B. PGRI Masa Awal setelah Kemerdekaan

- Kongres PGRI I, November 1945 Kongres Pendidik Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Puteri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah.
- Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Di antara pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmitho, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:
 - (a) mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia;
 - (b) mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; dan
 - (c) membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya (Suara Guru, November 1955).

2. Kongres II PGRI di Surakarta, 21-23 November 1946

- Melalui kongres ini, PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu: (a) sistem pendidikan secepatnya didasarkan pada kepentingan nasional; (b) gaji guru supaya tidak dihentikan; (c) diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan. Tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah, terbukti dengan ditunjuknya Rh. Koesnan menjadi anggota Panitia Gaji Pemerintah yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI.

3. Kongres III PGRI di Madiun, 27-29 Februari 1948

- Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini antara lain memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya setiap keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, tetapi dengan jumlah anggota sedikitnya 100 orang. Diharapkan, bahwa cabang PGRI yang lebih kecil itu dapat lebih efektif. Dalam cakupan daerah yang sangat terbatas itu PGRI mempunyai 76 cabang yang masing-masing ternyata dapat menunjukkan aktivitas dan vitalitas yang tinggi.

C. PGRI Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

- Kongres IV PGRI di Yogyakarta, 26-28 Februari 1950

Pejabat Presiden RI Assa'at memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidak bisa lain dan pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Kongres IV PGRI itu juga dihadiri oleh beberapa utusan dari luar "daerah Renville", yaitu. Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya; malahan ada yang datang dari Sumatera, yaitu dari Sigh, Bukittinggi dan Lampung.

Mereka datang dengan tekad bulat untuk mempersatukan diri dan bernaung di bawah panji-panji PGRI. Pengurus Pusat SGI di Bandung datang pada Kongres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri ke dalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi Serikat Guru Indonesia (SGI) dan Bandung terdiri atas: Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M. Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. Menurut catatan, Kongres IV mewakili anggota dari 76 cabang.

- PGRI sebagai suatu serikat sekerja, bergabung ke dalam SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebuah organisasi Vaksentral yang dalam sejarah kemerdekaan RI merupakan yang pertama berdiri. Sesudah Kongres III Madiun terlihat tanda-tanda adanya usaha beberapa orang dalam Presidium SOBSI yang hendak membawa Vaksentral ke dalam bentuk perjuangan politik yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan perjuangan PGRI yang saat itu telah bergabung dengan SOBSI.
- Setelah ternyata orientasi politik SOBSI ketika itu condong ke PKI, bahkan kemudian benar-benar menjadi organisasi PKI, maka pada tanggal 21-22 Agustus 1948 PB PGRI mengadakan sidang dengan Sentral Biro SOBSI di Yogyakarta. Akhirnya melalui pernyataan tanggal 20 September 1948, PGRI mengundurkan diri dari SOBSI sesuai dengan Anggaran Dasar PGRI sendiri yang non-partai politik serta asas dan dasar perjuangannya yang berlandaskan falsafah Pancasila.

D. PGRI Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

- Seperti pada kongres sebelumnya, pada Kongres IX PGRI di Surabaya bulan Oktober/November 1959, Soebandri dkk. melancarkan politik adu-domba di antara para peserta kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum. Kali ini pun, usaha tersebut tidak berhasil, dan M.E. Subiadinata terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB PGRI. Politik adu-domba dilanjutkan kembali pada Kongres X di Gelora Bung Karno, Jakarta tahun Soebandri dkk. melancarkan usaha keji dengan mengedarkan selebaran untuk memfitnah M.E. Subiadinata dengan menyatakan bahwa ia anti-Manipol dan lain sebagainya. Akibat surat selebaran ini, maka dilakukan penyelidikan dan penahanan oleh aparat keamanan terhadap 14 orang penandatangan "surat fitnah" tersebut. Namun M.E. Subandinata dengan jiwa besar berusaha membebaskan mereka untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Terpengaruh oleh suasana selama Kongres X berlangsung, akhirnya disepakati untuk memasukkan Pancasila/Manipol Usdek sebagai dasar PGRI.

1. Lahirnya PGRI Non-Vaksentral/PKI

- Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode-periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu pun bukan demi kepentingan guru atau profesi guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik dan luar dengan dalih “machtsvorming en machtsaanwending” (pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan) yang diterapkan melalui berbagai macam organisasi masyarakat. Kubu komunis berhasil menunjuk Soepardi dan Goldfried “macan” menjadi Ketua dan Wakil Ketua pemilihan PB PGRI. Ternyata, Goldfried termasuk salah seorang penandatangan “surat selebaran fitnah”, sehingga timbul protes dari sidang pleno, sehingga Goldfried akhirnya dikeluarkan dari panitia. Dengan demikian, pemilihan Ketua Umum dan susunan pengurus PB PGRI berjalan lancar dengan memilih kembali M.E. Subiadinata sebagai Ketua Umum.

2. PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI

- Periode tahun 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru, masa konsolidasi dan penataan kembali organisasi serta, masa meneruskan dan menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru. Hal ini dipenuhi dengan jalan kaderisasi secara berencana dan terus menerus. Dalam kehidupan PGRI, sudah lazim pimpinan-pimpinan organisasi di setiap eselon dibentuk melalui “praktek” di lapangan dengan ditunjang oleh dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan dalam ruang lingkup ilmu pendidikan sebagai modal pertama. Pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada tahun 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.

3. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI

- Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian disusul dengan Pidato Kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 merupakan kebijaksanaan yang diterima dengan penuh penghargaan dan harapan oleh segenap bangsa Indonesia yang telah lama mengalami penderitaan sebagai akibat dan kebijaksanaan politik. Akan tetapi sungguh dalam praktiknya Dekrit tersebut salah arah, sehingga tercipta pemerintahan diktator. Situasi masyarakat benar-benar berbeda. Segenap kegiatan masyarakat, termasuk kebijaksanaan pemerintah, didasari keyakinan bahwa "Politik adalah Panglima".

- Seperti halnya organisasi-organisasi lain yang sejenis, PGRI tidak luput dan ancaman tersebut. Pada Kongres IX PGRI di Surabaya (Oktober 1959), infiltrasi PKI ke dalam tubuh PGRI benar-benar terasa, dan lebih jelas lagi dalam Kongres X di Jakarta (November 1962). Setelah PKI yang diwakili oleh guru-guru berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi melakukan taktik-taktik penyusupan terhadap PGRI, mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang-terangan untuk memisahkan diri dari PGRI.
- Seperti dikemukakan sebelumnya, mereka membentuk organisasi yang menyebut dirinya PGRI NonVaksentral (disingkat PGRI NV) pada bulan Juni PGRI NV dibentuk di mana-mana, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu hanya ada di atas kertas sementara anggota-anggotanya pun kadang-kadang bukan guru, melainkan pegawai Jawatan Kereta Api, buruh perkebunan, atau yang lainnya.

E.PGRI Masa Orde Baru 1. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

- Peristiwa G30 S/PKI merupakan puncak dan apa yang sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh antara kekuatan anti-PKI dan pro-PKI, infiltrasi dan fitnah oleh kelompok pro-PKI, berdirinya PGRI Non-Vaksentral, dan lain-lain. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, PGRI-Kongres (yang dibedakan dan PGRI Non-Vaksentral) di bawah pimpinan M.E. Subiadinata dan kawan-kawan berperan aktif dalam kubu yang mengganyang PKI dan ormas-ormasnya.

- Bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain, para guru anggota PGRI turun ke jalan dengan meneriakkan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yakni: "Bubarkan PKI, Ritul Kabinet 100 Menteri, dan Turunkan Harga-harga!". Mereka membentuk kesatuan-kesatuan aksi, misalnya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), sedangkan para guru membentuk KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) pada tanggal 2 Februari 1966.

- Tugas utama KAGI adalah: (a) membersihkan dunia pendidikan Indonesia dan unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu PGRI Non-Vaksentral/PKI, Serikat Sekerja Pendidikan, dan PGTI (Persatuan Guru Teknik Indonesia); (b) menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI; (c) memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik.

2. Konsolidasi Organisasi pada Awal Orde Baru

- Konsolidasi organisasi PGRI dilakukan ke daerah-daerah dan cabang-cabang, dengan prioritas ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembentukan pada kedua daerah tersebut tidak saja akibat kuatnya pengaruh PGRI Non-Vaksentral/PKI sebelumnya, tetapi juga menyangkut masalah dualisme dalam kepemimpinan nasional. Ini bermula dari zaman Orde Lama ketika politik menjadi panglima, sehingga banyak guru dan pengurus PGRI harus memilih dan berlindung di bawah partai-partai politik yang berkuasa pada waktu itu.

F. PGRI Masa Reformasi

- PGRI juga melakukan serangkaian perubahan melalui kongres XVIII, November 1998 di Bandung sebagai respon penyesuaian terhadap tuntutan reformasi. Pada saat itulah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI mengalami perubahan guna menjawab tantangan global, tantangan nasional, organisasional. PGRI mengalami perubahan sebagai organisasi yang harus mampu beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai the learning organization yaitu organisasi yang senantiasa belajar sebagai organisasi yang secara berkelanjutan melakukan transformasi diri secara lebih baik dalam mengelola pengetahuan, penggunaan teknologi, sumber daya manusia, perluasan pembelajaran, sebagai adaptasi dalam perubahan lingkungan.

- Dalam mengadaptasi perubahan lingkungan yang demikian, PGRI dituntut memiliki kecakapan untuk:
 - (1) lebih siap mengantisipasi dan beradaptasi terhadap dampak perkembangan lingkungan;
 - (2) mengakselerasi dan mengembangkan hasil, proses, dan layanan yang lebih baik;
 - (3) menjadi lebih cakap belajar dari pesaing dan mitra kerja;
 - (4) melancarkan transfer pengetahuan dari satu bagian organisasi ke bagian lainnya;
 - (5) belajar secara efektif dan kesalahan-kesalahan sendiri;
 - (6) memberdayakan semua sumber daya manusia pada setiap jenjang organisasi;
 - (7) mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menerapkan perubahan strategis;
 - (8) merangsang perbaikan secara terus menerus pada setiap bidang dan jenjang organisasi